



YPANBA

Yayasan Perempuan dan Anak Negeri Banda Aceh

POLICY BRIEF

Yayasan Perempuan dan Anak Negeri Banda Aceh (YPANBA)

Disampaikan pada Audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Utara, Jumat/22 Mei 2026.

PENGUATAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS KOMUNITAS PASCA BENCANA DI KABUPATEN ACEH UTARA

Ringkasan Eksekutif

Bencana Hidrometeorologi yang berdampak luas di Aceh pada akhir November 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas, termasuk di Kabupaten Aceh Utara sebagai wilayah dengan jumlah gampong terbanyak di Aceh. Situasi krisis tersebut tidak hanya menyebabkan krisis kemanusiaan, kerusakan fisik dan gangguan layanan dasar, tetapi juga memperkuat kerentanan bagi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok berisiko lainnya terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan keterbatasan akses terhadap ruang aman.

Yayasan Perempuan dan Anak Negeri Banda Aceh (YPANBA) menerima 79 kasus dengan variasi bentuk kekerasan (34 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 33 kasus pernikahan siri, 2 kasus penelantaran anak) yang dialami perempuan dan anak. Kasus-kasus tersebut karena berbagai faktor, diantaranya lemahnya sistem perlindungan berbasis komunitas, ketimpangan relasi, terbatasnya ruang aman, serta menurunnya ketahanan ekonomi keluarga menjadi faktor yang memperbesar risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak pasca bencana.

Melalui policy brief ini, YPANBA mendorong penguatan pendekatan perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas dengan melibatkan secara aktif TP PKK, aparat gampong, lembaga adat, layanan pemerintah, serta berbagai organisasi masyarakat untuk memperkuat sistem pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Utara.

Latarbelakang

Bencana Hidrometeorologi yang terjadi di Aceh pada akhir November 2025 telah memicu situasi darurat kemanusiaan yang luar biasa, bahkan dampaknya sangat luas di 18 kabupaten Kota, salah satunya Aceh Utara dengan jumlah desa terbanyak yaitu

Jalan K. Main No. 191 Kelurahan Lampaseh Aceh-Kota Banda Aceh, email Email:

ypanba.aceh@gmail.com, ypanbananggroe-aceh@proton.me

Kontak: (+62) 0822-7693-6905

715 gampong. Berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hedrometeorologi Aceh tertanggal 7 Januari 2026, tercatat sedikitnya 674,842 KK dan 2,583,376 orang terdampak. Dan 56,777 KK, 214,084 Jiwa harus mengungsi.

Dampak yang sangat luas tersebut telah menempatkan perempuan, anak, Lansia, difabel serta kelompok berisiko lainnya pada tingkat resiko yang semakin tinggi termasuk diantaranya resiko yang membahayakan keselamatan, keterpinggiran dalam ruang pengambilan keputusan dan ancaman perlindungan karena ruang aman yang semakin terbatas. Dari respons bencana sejak tanggap darurat sampai masa transisi menuju fase pemulihan YPANBA menemukan kondisi perempuan, anak dan Lansia di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan ada kondisi yang saling terkait dengan kerentanan lain seperti hilangnya ruang kelola perempuan karena rumahnya hilang akibat bencana, status Kepala Keluarga Perempuan dan “KK gantung” yang membuat perempuan sering kali kehilangan haknya dalam mengakses bantuan, serta entitas perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan lanjut usia, status perkawinan, status sosial ekonomi, situasi bencana yang berulang serta sumber kehidupan yang hilang, semuanya saling mempengaruhi kemampuan perempuan untuk memproteksi diri, memenuhi kebutuhan dasarnya, menciptakan ruang aman bagi diri dan keluarganya, bahkan untuk melakukan evakuasi saat terjadi bencana susulan, mengakses bantuan, dan kemampuan untuk melakukan pemulihan pada diri dan keluarga.

Peristiwa bencana, juga berdampak pada terganggunya layanan dasar, terhambatnya keberfungsian layanan di berbagai tingkat, termasuk kerusakan infrastruktur, serta keterbatasan akses terhadap layanan khusus seperti kesehatan, pemenuhan gizi, ketidakpastian ruang aman dan keterbatasan perlindungan kepada perempuan dan anak, kondisi ini semakin memperburuk risiko kekerasan berbasis gender (KBG), eksploitasi, dan penelantaran. Sepanjang Desember 2025 sampai Mei 2026 dalam proses upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan upaya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, anak, Lansia, difabel dan kelompok dengan resiko tinggi lainnya, YPANBA menerima 79 laporan kasus dengan variasi bentuk kekerasan (34 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 33 kasus pernikahan siri, 2 kasus penelantaran anak, telah dialami perempuan dan anak, baik kasus yang terjadi sebelum maupun saat peristiwa bencana.

Dan berdasarkan hasil penjangkauan dan analisis kasus yang dilakukan oleh YPANBA, ditemukan bahwa ragam kasus tersebut di picu oleh banyak faktor, salah satu yang sangat memprihatinkan adalah ruang aman yang semakin sempit, ketidakberfungsinya sistem perlindungan komunal, yang kaitannya dengan control, sistem pencegahan, penanganan, dan pendidikan publik yang tidak berjalan maksimal. Disamping itu ada faktor sumber kehidupan yang semakin sempit, yang membuat resilience perempuan semakin lemah dan ketahanan keluarga yang lemah.

REKOMENDASI

Situasi tersebut jika tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak pada kehidupan sosial yang lebih luas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menurun, Indeks Pembangunan Gender menurun yang pada akhirnya akan berpengaruh pada

Jalan K. Main No. 191 Kelurahan Lampaseh Aceh-Kota Banda Aceh, email Email:

ypanba.aceh@gmail.com, ypanbananggroe-aceh@proton.me

Kontak: (+62) 0822-7693-6905

pencapaian SDG's ke depan, baik dalam ruang lingkup pembangunan Kabupaten Aceh Utara secara Khusus dan Aceh secara umum. Oleh karenanya YPANBA merasa penting menyampaikan rekomendasi mengenai aksi prioritas yang perlu dilakukan bersama dengan mempertimbangkan beberapa pendekatan strategis maupun taktis sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi desa seperti PKK, TUHA Puet, Posyandu, Majelis taklim, Karangtaruna dan organisasi gampong lainnya dalam memperkuat upaya perlindungan dan ruang aman bagi perempuan, anak serta kelompok dengan resiko tinggi lainnya.
2. Mengkoneksikan layanan lintas tingkatan dengan kebutuhan perlindungan perempuan, anak serta kelompok dengan resiko tinggi lainnya.
3. Memaksimalkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak
4. Meningkatkan dukungan anggaran untuk pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan pemulihan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
5. Implementasi kebijakan yang menasar akar persoalan terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
6. Peningkatan kesadaran, perspektif dan political will pelaksana kebijakan di berbagai tingkat.
7. Memaksimalkan berbagai platform pemerintah untuk menjadi ruang/media pendidikan publik, kampanye dan ruang juangnya perempuan.

YPANBA meyakini bahwa upaya strategis dan taktis jika dilakukan dengan bersinergis, kolaboratif serta komitmen yang kuat lintas sektor, lintas aktor, maka perubahan-perubahan yang diharapkan akan mudah terwujud, dan situasi krisis terkait dengan ruang aman akan mudah diatasi, risiko spesifik serta dampak yang dialami oleh perempuan, anak, difabel, ibu hamil dan menyusui, perempuan lanjut usia, serta kelompok dengan resiko tinggi lainnya.